

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

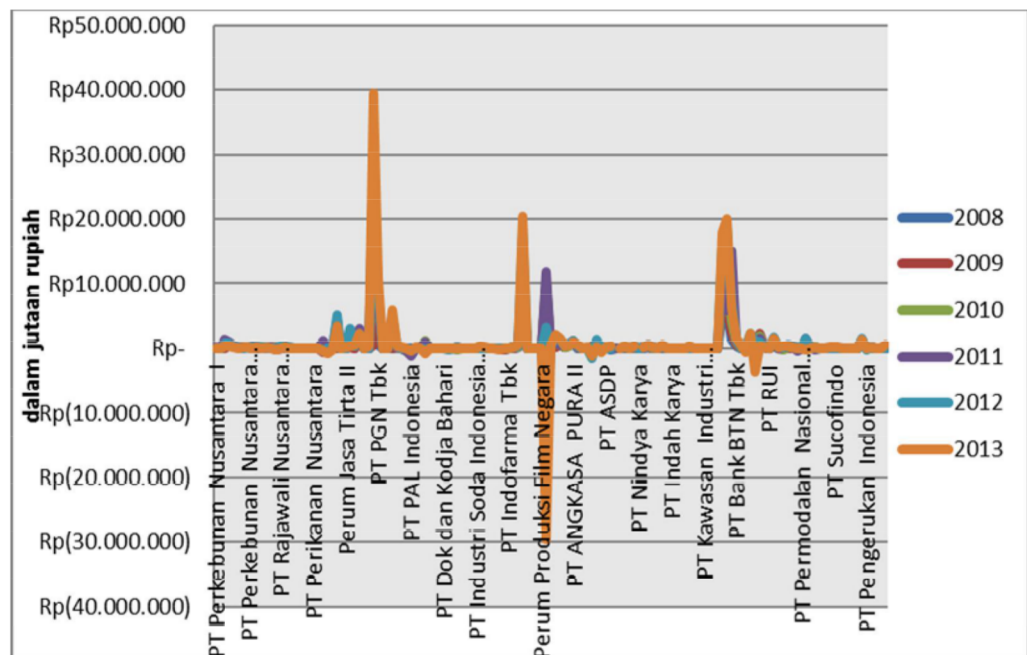
1.1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pembentukan BUMN merupakan salah satu bentuk realisasi pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar terhadap kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik, contohnya adalah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Aneka Tambang (Persero), Tbk., dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

Dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (Persero) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dalam hal ini, keuntungan yang dimaksud dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu untuk tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Tujuan pembentukan BUMN secara sosial antaranya adalah sebagai penyedia barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat serta sebagai badan usaha yang ikut serta dalam memberikan bimbingan dan bantuan bagi pengusaha-pengusaha kecil, koperasi dan masyarakat. Tujuan secara ekonomi yaitu BUMN dimaksudkan untuk dapat memberikan sumbangan kepada

perkembangan perekonomian nasional dan untuk dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan negara serta meraih keuntungan.

Harapan pemerintah yang begitu besar terhadap kinerja BUMN dapat dilihat dari tujuan-tujuan pendirian tersebut. Namun pada kenyataannya, tidak banyak BUMN yang dapat memenuhi tujuan pendiriannya oleh pemerintah secara optimal. BUMN dikenal luas sebagai badan usaha yang memiliki kinerja yang kurang optimal dan kurang efisien apabila dibandingkan dengan perusahaan yang dikelola swasta. Kinerja yang banyak mendapat sorotan adalah kinerja keuangan BUMN. BUMN menghasilkan laba yang tidak cukup tinggi dan masih banyak juga BUMN yang merugi. Adapun deskripsi dinamika laba/rugi tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Sumber: Kementerian Negara BUMN, diolah

Gambar 1.1. Laba Rugi BUMN, Tahun 2008 s.d. 2013

Dari gambar 1.1. dapat kita lihat bahwa secara agregat laba BUMN mengalami peningkatan setelah tahun 2008. Namun, masih

juga terdapat beberapa BUMN yang mengalami kerugian semakin besar dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi permasalahan kinerja tersebut, privatisasi menjadi salah satu cara yang diyakini pada saat itu merupakan cara yang dapat meningkatkan efisiensi dan performa kerja BUMN. Motif privatisasi yang perlu dilakukan adalah peningkatan efisiensi sektor publik selayaknya efisiensi kinerja sektor swasta.

Privatisasi dapat ditempuh melalui beberapa metode antara lain, melalui penjualan saham di pasar modal, *private placement* oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di bawah 50%, *private placement* oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50%, *private placement* oleh investor luar negeri dengan penyertaan di bawah 50%, dan *private placement* oleh investor luar negeri dengan penyertaan di bawah 50%.

Selain itu, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia juga menerbitkan Keputusan Menteri BUMN No KEP-100/MBU/2002 yang didalamnya berisi seperangkat alat penilaian kinerja BUMN. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat mendorong BUMN menuju peningkatan efisiensi, daya saing serta kinerja yang lebih baik. Selain penerbitan peraturan tersebut, usaha pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN terutama dari segi kinerja keuangan, juga dilakukan dengan cara melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN menurut Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yaitu penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN melalui cara privatisasi tersebut memunculkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak yang kontra terhadap ide ini, berpendapat bahwa privatisasi bukanlah langkah yang nasionalis. Pihak ini berpendapat bahwa BUMN adalah aset negara yang harus dipertahankan,

meskipun BUMN tersebut terus merugi atau tidak menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pihak yang pro dengan gagasan privatisasi ini berpendapat bahwa privatisasi perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN yang bersangkutan. Privatisasi dapat dilakukan sepanjang hal tersebut dapat menimbulkan efek yang baik terhadap BUMN tersebut serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian negara.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., merupakan salah satu BUMN pada sektor industri pengolahan baja yang telah diprivatisasi oleh pemerintah melalui penawaran di pasar modal atau lebih dikenal sebagai *Initial Public Offering* (IPO). Pada tahun 2010, di tengah kondisi pasar yang masih bergejolak, PT Krakatau Steel (Persero) berhasil menjadi perusahaan terbuka dengan melaksanakan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2011, PT Krakatau Steel (Persero) membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 17,9 triliun dan laba bersih Rp 1,02 triliun. Privatisasi dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham.

Memperhatikan hal-hal tersebut, peneliti menilai bahwa perlu dilakukan penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan privatisasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. untuk mengoptimalkan fungsi kemanfaatan publik sebagai BUMN.

Oleh karena itu, peneliti mencoba menganalisis perubahan kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi untuk kemudian dapat membuktikan kebenaran hipotesis yang berkembang selama ini. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memilih judul “Analisis Kinerja Keuangan PT Krakatau Steel Tbk. yang Melakukan Privatisasi Melalui IPO”.

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terjadi peningkatan kinerja keuangan yang signifikan setelah privatisasi PT Krakatau Steel (Persero).

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan Masalah Pokok Penelitian di atas maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan rasio keuangan yang terjadi pada PT Krakatau Steel (Persero) sebelum dan sesudah privatisasi?
2. Bagaimana signifikansi perubahan rasio keuangan yang terjadi pada PT Krakatau Steel (Persero) setelah privatisasi?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian

Dari masalah pokok penelitian, ditemukan bahwa variabel terikat adalah kinerja keuangan BUMN yang diindikasikan dengan rasio keuangan, sedangkan variabel bebas yang mempengaruhi perubahan variabel terikat adalah privatisasi BUMN.

1.2.2. Uraian Konseptual Tentang Variabel

Kinerja Keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu dengan menggunakan alat analisis keuangan perusahaan yang didasarkan pada perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan yang disebut rasio keuangan.

Penilaian rasio keuangan dapat digunakan investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa mendatang. Beberapa rasio keuangan yang umumnya digunakan perusahaan adalah rasio profitabilitas (ROA dan ROE), rasio likuiditas (*Current Ratio* dan *Cash Ratio*), rasio aktivitas (TATO dan Perputaran Persediaan), dan rasio solvabilitas (DER).

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diungkap adalah :

1. mengetahui perbedaan kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi khususnya PT Krakatau Steel (Persero).
2. menguji signifikansi perubahan kinerja BUMN setelah privatisasi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diungkap antara lain, bagi :

1. Pengembangan disiplin ilmu akuntansi.
2. Pembuktian secara empiris kepada pemerintah maupun masyarakat mengenai pengaruh kebijakan privatisasi terhadap kinerja BUMN.